

**IMPLEMENTASI UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK
(STUDI PADA FUNGSI REKRUTMEN KADER PARTAI
NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) WILAYAH SUMATERA
UTARA)**

SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMMAD PADRIS FATAHIYA
178520073**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)29/10/25

**IMPLEMENTASI UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK
(STUDI PADA FUNGSI REKRUTMEN KADER PARTAI
NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) WILAYAH SUMATERA
UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH:

MUHAMMAD PADRIS FATAHIYA

178520073

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Pada Fungsi Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara).

Nama : Muhammad Padris Fatahiya

NPM : 178520073

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Khairunnisa Lubis S.Sos, M.Ipd
Pembimbing

Diketahui:



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Padris Fatahiya
NPM : 178520073
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul : **“Implementasi UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Pada Fungsi Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara”** Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, 19 Juni 2024

Muhammad Padris Fatahiya

NPM. 17.852.0073

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Muhammad Padris Fatahiya
NPM : 178520073
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Implementasi UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Pada Fungsi Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Juni 2024

Muhammad Padris Fatahiya

NPM. 17.852.0073

MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *success stories*-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kamu ceritakan”

(Boy Chandra)

“Percaya dengan diri sendiri, fokus terhadap diri lu, perbaiki diri lu, bukan lihat rumput tetangga, kalau lu bisa melakukan itu, lu akan berkembang”

(Justinus Lhaksana)

ABSTRAK

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik. Anggota yang telah direkrut oleh partai, dilanjutkan dengan kaderisasi yang berguna bagi partai untuk kepentingan rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya istilah kader loncatan, kader karbitan atau kader titipan, sehingga menarik untuk dijadikan penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif supaya penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara, dapat dideskripsikan secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari penelitiannya. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah wakabid Pemenenagan Pemilu, Kepala Sekretariat DPW Nasdem Sumatera Utara, anggota/kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekrutmen politik pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya saja kaderisasi untuk mencetak SDM yang berkualitas perlu dioptimalkan. Saran dalam penelitian adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil, mengoptimalkan kembali kaderisasi, mengembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara, serta menampilkan eksistensi partai sehingga masyarakat dapat lebih mengenal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara.

Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara

ABSTRACT

Political recruitment is one of the functions of political parties which is important for the continuity and sustainability of political parties. Members who have been recruited by the party are continued with cadre formation which is useful for the party for the purposes of recruiting administrators, recruiting legislative candidate candidates, as well as recruiting regional head and deputy regional head candidates. However, on the other hand, in the midst of the growth of political parties in Indonesia, the implementation of political recruitment often finds phenomena that are considered fraudulent, such as the term "jump cadre", "carbitan cadre" or "trusted cadre", so it is interesting to use research regarding the implementation of the function of political parties as a means of political recruitment in the Party. National Democrat (Nasdem) North Sumatra Region.

This research uses a qualitative approach so that research regarding the implementation of the function of political parties as a means of political recruitment in the National Democratic Party (Nasdem) in the North Sumatra Region can be described in depth and broadly based on the researcher's experience from his research. The methods used are interviews, observation and documentation. The informants in this research were the deputy head of the organization, membership, cadre formation and recruitment, as well as members/cadres of the North Sumatra Region of the National Democratic Party (Nasdem). The research results show that the implementation of political recruitment in the National Democratic Party (Nasdem) in the North Sumatra Region is in accordance with Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, only that cadre formation to produce quality human resources needs to be optimized. The suggestion in the research is that the National Democratic Party (Nasdem) in the North Sumatra Region needs to improve the implementation of party performance and realize the party's work program in real terms, re-optimize cadre formation, develop a democratic system within the National Democratic Party (Nasdem) in the North Sumatra Region, and display the existence of the party. so that people can get to know the National Democratic Party (Nasdem) in the North Sumatra Region better.

Keywords: Political Recruitment, National Democratic Party (Nasdem) North Sumatra Region



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Muhammad Padris Fatahiya
2. Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun XVI Jl. Datuk Kabu Pasar III
7. Status : Belum Menikah
8. Email : padrizz0293@gmail.com
9. No. Handphone : 081231901049

PENDIDIKAN FORMAL

- 2000 – 2006 : SD Negeri 065853 Medan
- 2006 – 2009 : SMP Negeri 3 Medan
- 2009 – 2012 : SMA Negeri 6 Medan
- 2017 – 2024 : Universitas Medan Area
- Jurusan : Administrasi Publik, Fakultas Isipol

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Pada Fungsi Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara”** ini dengan baik.

Penulis memahami tanpa adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penulis akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdam, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing penulis.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen dan staf pengajar Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan. Serta kepada staff pegawai dan tim IT Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya Bang Sutrisno, Bang Reda dan Bang Riki.

5. Teristimewa dan tercinta kepada orang tua dan adik-adik yang sangat peduli yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.
6. Kepada Kepala Sekretariat DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Hasan Simatupang S.Kom yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan memberikan arahan serta juga izin dalam penyelesaian penelitian ini. Serta kepada seluruh informan yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu yang telah memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca terkhusus untuk Program Studi Administrasi Publik.

Medan, 19 Juni 2024

Penulis

Muhammad Padris Fatahiya

NPM : 178520073

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Partai Politik	9
2.2 Tujuan dan Fungsi Partai	15
2.3 Rekrutmen Politik	20
2.3.1 Model Rekrutmen & Seleksi Politik	25
2.3.2 Prinsip-prinsip Rekrutment.....	26
2.3.3 Sifat Rekrutment	28
2.3.4 Jalur Rekrutment & Seleksi Politik.....	29
2.3.5 Faktor-faktor Rekrutmen Politik.....	30
2.4 Partai Nasional Demokrat (Nasdem).....	31
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu	33
2.6 Kerangka Berpikir	35
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Waktu Penelitian	39
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Sumber Data Penelitian	40
3.6 Metode Pengumpulan Data	41

3.7	Keabsahan Data	44
3.8	Metode Analisa Data	45
3.9	Prosedur Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.2	Visi & Misi Partai Nasdem.....	50
4.1.3	Ruang Lingkup Kerja Departemen Keanggotaan dan Organisasi	53
4.1.4	Ruang Lingkup Kerja Departemen Ideologi dan Kaderisasi.....	54
4.2	Pelaksanaan Rekrutmen Politik Oleh DPW Partai Nasdem	54
4.2.1	Rekrutmen Anggota dan Kader DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara	54
4.3	Rekrutmen Pengurus DPW Partai Nasdem	61
4.4	Kaderisasi Anggota, Kader dan Pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara	62
4.5	Faktor Yang Mendukung & Menghambat DPW Partai Nasdem	64
4.5.1	Faktor Pendukung Pelaksanaan Rekrutmen Politik	64
4.5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Politik.....	66
4.6	Pembahasan	69
4.6.1	Implementasi Fungsi Partai politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Nasdem.....	70
4.7	Faktor-faktor Pendukung & Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik	73
4.7.1	Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Partai Nasdem	73
4.7.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Partai Nasdem	74
BAB V PENUTUP		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR GAMBAR

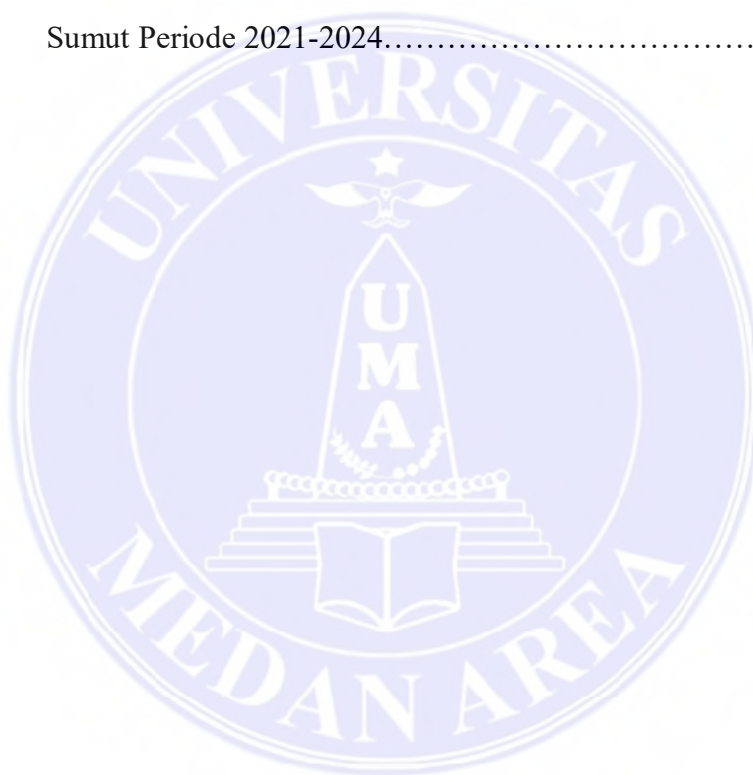
	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36



DAFTAR TABEL

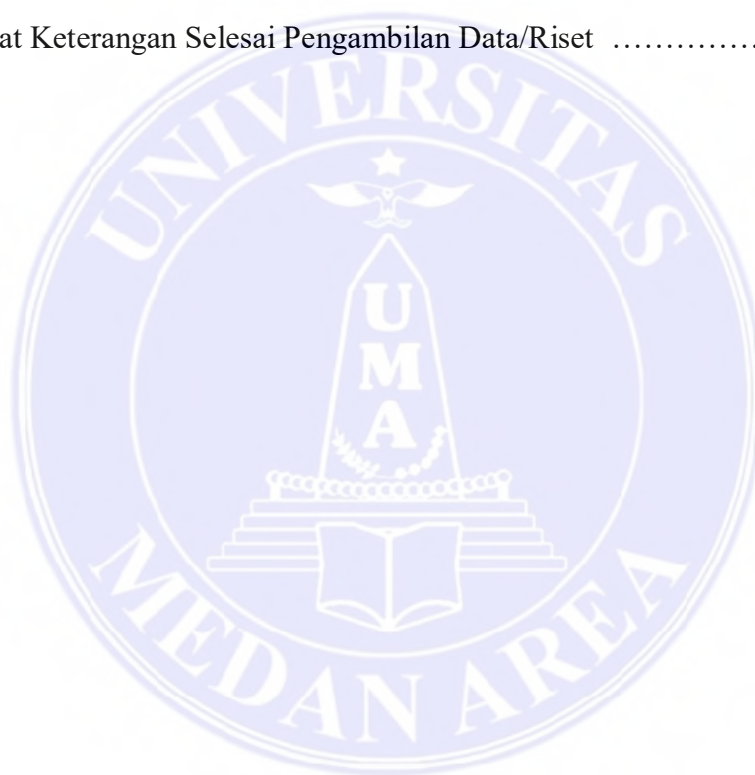
Halaman

Tabel 1.1	Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD	
	Sumut Tahun 2019	5
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Partai Nasdem Provinsi	
	Sumut Periode 2021-2024.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Pemenagan Pemilu	84
2. Wawancara dengan Kepala Sekretariat DPW Nasdem Sumut	84
3. Wawancara dengan Kader Partai DPW Nasdem Sumut	85
4. Lokasi Penelitian	85
5. Data Informan	86
6. Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menetapkan bahwa, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka di Indonesia dibentuklah sistem perwakilan politik sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat (Maran, 2007:201). Perwakilan sebagaimana diartikan Alfred de Grazia dalam Sanit (1985:1) adalah hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakil.

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar ideologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum (public policy). Selain itu, sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia harus mengakui dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara, antara lain; hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik.

Dewasa ini istilah politik dan partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2008:15). Sedangkan partai politik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan (Suprihatini, 2008: 19). Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Pengrekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal (Rush dan Althoff, 2000: 23). Sedangkan rekrutmen politik berdasarkan Pasal 29 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut.

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Namun disisi lain, pemilihan kepala daerah atau kader politik seharusnya memberikan kesempatan luas bagi setiap orang untuk dapat mengakses jabatan publik sebagai kepala daerah atau pemimpi dalam suatu wilayah. Namun agaknya pilkada serentak justru menumbuhsuburkan dinasti politik didaerah. Pada beberapa daerah provinsi maupun kabupaten / kota, kepemimpinan daerah didominasi keluarga inti dan sanak saudara.

Fenomena dinasti politik juga ditemui dalam pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Utara, hal ini terlihat dari beberapa calon kepala daerah yang masih memiliki kekerabatan atau hubungan keluarga dengan kepala daerah yang masih aktif atau yang pernah menjabat, salah satunya di kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap maju di pilkada Paluta 2018. Andar Amin Harahap adalah anak kandung dari Bupati Bachrum Harahap yang memimpin Paluta selama dua periode sebelumnya. Latar belakang profesi Andar Amin adalah PNS yang menjadi Walikota Padang Sidimpuan hasil pilkada tahun 2013, meneruskan kepemimpinan Ayah Mertuanya H Zulkarnain Nasution yang merupakan Walikota Padang Sidimpuan periode sebelumnya. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan kader yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik (Firmanzah, 2008:248). Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat

memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya. Partai nasional Demokrat (Nasdem) merupakan salah satu partai yang didirikan pada tahun 2011. Partai Nasdem bisa dikatakan sebagai partai baru yang memiliki banyak suara atau pendukung sehingga dalam pemilu DPRD 2019 diwilayah Sumatera Utara mendapatkan 12 kursi, hal ini menjadi salah satu contoh bahwa Partai Nasdem adalah Partai yang cepat berkembang di wilayah Sumatera Utara. Berikut tabel 1 Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Wilayah Sumatera Utara 2019.

Tabel 1.1 Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Sumatera Utara Tahun 2019

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI
1	PKB	2
2	Gerindra	15
3	PDI-P	19
4	Golkar	15
5	Nasdem	12
8	PKS	11
9	Perindo	1
10	PPP	2
12	PAN	8
13	Hanura	6
14	Demokrat	9

Sebagai partai baru, Nasdem memiliki kader dan simpatisan yang tersebar diseluruh Provinsi di Indonesia, maka dari itu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam melakukan rekrutmen politik.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Partai Nasional Demokrat Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik serta sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang rekrutmen politik, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 di Universitas Medan Area Dan bagi partai politik, dalam hal ini Partai Nasdem Demokrat wilayah Sumatera Utara, diharapkan dapat memberikan masukan, tambahan informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan partai terutama yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik

Sebagai individu atau tepatnya sebagai suatu pribadi, manusia tak akan bisa hidup dan berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara (Maran, 2007:7), dalam perspektif inilah manusia disebut sebagai makhluk politis. Manusia sebagai makhluk politis adalah sebagai pelaku kehidupan masyarakat dan negaranya, ia juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga dari suatu negara. Oleh karena itu kaitan antara manusia dengan politik sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang “polis” adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles dalam Firmanzah (2008:48). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik, antara lain adalah sebagai berikut.

Budiardjo (2008:15) mengatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Machiavelli dalam Firmanzah (2008:48) dari bukunya *The Prince* melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan absolut.

Rod Hague et al. dalam Budiardjo (2008:16), “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.

Andrew Heywood dalam Budiardjo (2008:16) mengemukakan bahwa “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.

Jadi politik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, serta cara bagaimana memperoleh kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan orang lain yang menjadi anggota-anggotanya agar bertindak sesuai yang diperintihkannya.

Politik erat kaitannya dengan partai politik. organisasi partai politik merupakan komponen yang penting sebagai bukti dari negara demokratis. Partai politik di negara demokrasi dijadikan sebagai salah satu wadah dari aspirasi rakyat. Tanpa partai politik, mekanisme negara demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif. Keberadaan partai politik juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

Kata partai berasal dari kata *pars* dalam bahasa Latin, yang berarti “pagian”, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, kata partai adalah *party*

berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama (Hamid, 2008:4).

Definisi tertua partai politik, mungkin bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh politik Inggris (1729-1797). Burke dalam Hamid (2008:4) pada tahun 1771 menulis bahwa partai adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempromosikan. Dengan usaha bersama, kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama.

Max Weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern, dalam Firmanzah (2008:66) Max Weber mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya yang berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Selanjutnya banyak ilmuwan lain yang memberikan definisi tentang partai politik, seperti yang dikemukakan oleh para ahli dalam Hamid (2008: 6-7) dibawah ini, sebagai berikut.

Sigmund Neuman mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan

lembaga-lembaga pemerintah yang resmi yang mengaitkannya dengan aksi politik ya.ng lebih luas

Bagi Joseph La Palombara dan Myron Weiner, partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan temporal dengan para pendukungnya di daerah. Menurut Roy C. Macridi, partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Definisi yang agak belakangan, misalnya dikemukakan oleh Peter Schroder (2000), bahwa partai politik merupakan kelompok orang-orang berpendirian sama, yang mencari kekuasaan dan pengaruh ditingkat pemerintahan, untuk dapat mempengaruhi pembentukan kehendak/tujuan dan mewujudkan pandangan politik bersama.

Berikut ini beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku *Partai Politik di Indonesia*, Suprihatini (2008:2) antara lain adalah sebagai berikut.

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak

terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut :

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur Organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. ... sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional, ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya (Firmanzah, 2008: 67-68).

Selain pengertian-pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para pakar di atas, di Indonesia sendiri ada beberapa definisi mengenai partai politik yang terkenal, antara lain seperti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008: 404).

Rusadi Kantaprawira mengatakan bahwa partai politik, yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004: 63).

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (Hamid, 2008: 9).

Eap Saefulloh Fatah menguraikan pengertian partai politik adalah sebagai kumpulan individu perkumpulan yang terorganisir dengan definisi mengenai posisi, fungsi, dan hirarki anggota yang jelas dan baku, ada ikatan identitas yang sama di antara anggotanya, baik berupa ideologi maupun kepentingan dan memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan; dan ikut serta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuannya (dalam Hamid, 2008: 9).

Jadi yang disebut partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat, muncul partai-partai baru seiring dengan perkembangan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi, terlebih lagi menjelang diadakannya pesta demokrasi yaitu pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan seleksi terhadap partai politik yang layak dan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, guna efisiensi partai politik itu sendiri. Partai

politik di Indonesia memiliki corak, karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tergantung dari jenis partai dan ideologi partainya. Keanekaragaman partai politik yang ada di negara Indonesia ini juga menjadi bukti atas penerapan dari negara demokrasi.

2.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain tujuan umum dan tujuan khusus, partai politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Untuk kepentingan internalnya, setiap parati butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, parati tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2008: 405-409).

Selain fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi yang dikemukakan oleh Budiardjo diatas, dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik di Indonesia*, Suprihatini menyebutkan beberapa fungsi partai politik, antara lain adalah partai politik sebagai:

1. Sarana partisipasi politik

Artinya, partai politik ini berupaya memobilisasi atau mengarahkan massa (warga negara) ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi parati politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai

dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

2. Sarana artikulasi kepentingan

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan maksudnya, partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi.

3. Sarana agregasi kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai - partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

4. Sarana pembuat kebijakan

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentuknya partai politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. ... dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang ada (Suprihatini, 2008: 19-20).

Menurut pendapat Sigmund Neumann dalam Hamid (2008: 12), partai politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai empat fungsi, yaitu: *Pertama*, partai mengatur kehendak umum yang kacau; *Kedua*, mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik; *Ketiga*, menjadi penghubung antara

pemerintah dan pendapat umum; dan *keempat*, memilih para pemimpin. Macridis mengemukakan bahwa:

“fungsi-fungsi partai politik yang diajukan oleh para ilmuwan politik dan sosiologi, seperti representasi (perwakilan), perantara (*brokerage*), konversi, dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan perumusan kebijaksanaan; serta kontrol terhadap pemerintah tidaklah memberikan konseptualisasi yang memuaskan mengenai hubungan fungsi dan struktur politik. Karena itu, Macridis mengajukan satu fungsi dukungan (*supportive function*). Partai harus menciptakan dukungan pada sistem, ...” (dalam Hamid, 2008:14).

2.3 Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sebab dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Meilandi, 2018).

Selain itu, menurut (Septiana, 2019), partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan, maka partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik

menjamin keberlangsungan dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk melatih calon-calon pemimpin.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan public, dalam sistem otoritarian ia di tunjuk atau di angkat , sedang dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum (Hamid, 2008: 11).

Menurut sianturi (Dalam Workshop: 2015), untuk memperkuat fungsi rekrutmen partai politik menarik untuk menampilkan rekomendasi, yakni:

1. Perlu diubah paradikma keanggotaan partai politik. Anggota baru harus dianggap sebagai sumber daya yang sangat krusial untuk partai. Anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan dapat dijaga, anggota perlu mempunyai rasa memiliki partai.
2. Segera membuat pola rekrutmen yang sistematis. Tindakan yang harus diambil antara lain:
 - a. Membentuk tim rekrutmen
 - b. Menentukan kelompok sasaran, konstituen mana yang akan di rekrut (pemuda, perempuan, penduduk kota/desa, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan)
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen.
 - d. Menentukan pesan utama yang akan di komunikasikan
 - e. Menentukan waktu dan lokasi perekrutan.

3. Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dll.
4. Memperkuat sayap dan *onderboup* partai, melalui organisasi tersebut rekrutmen kalangan tertentu (pemuda, perempuan) di permudah.
5. Membangun sistem dan *database* keanggotaan.
6. Menggaji staf profesional untuk mengurus beberapa pekerjaan partai yang tidak mampu di urus oleh anggota biasa partai.
7. Menjaga supaya anggota tetap aktif dan bermotivasi tinggi. Anggota akan bermotivasi tinggi kalau:
 - a. Dilibatkan dalam kegiatan partai
 - b. Diberi tanggung jawab tugas partai sesuai dengan kemampuan
 - c. Diberi penghargaan setelah tugas diselesaikan
 - d. Dibuat acara sosial seperti piknik, pentas bersama dll.
8. Melakukan aktivitas pelatihan secara rutin, membangun program pelatihan anggota dan memperhatikan isu-isu berikut:
 - a. Introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai
 - b. Pengajaran sistem politik dan undang-undang yang berkait
 - c. Fungsi dan struktur partai politik
 - d. Pemahaman atas masalah-masalah aktual serta teknik dalam menyelesaikan suatu permasalahan (*problem solving skills*).
 - e. Pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan partai
 - f. Teknik advokasi sosial
9. Membuat anggota merasa puas dan merasa memiliki partai. Demikian rekrutmen anggota baru secara otomatis akan di lakukan oleh anggota

“anggota yang puas adalah prekrut yang paling baik”.

Fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik di bedakan antara rekrutmen politik di Negara demokrasi dan rekrutmen di Negara otoriter.

1. Fungsi rekrutmen di Negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sebab dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408)
2. Fungsi rekrutmen di Negara otoriter, partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi markisme-leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, karena iklim politik tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan Negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada Negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh partai (Budiardjo, 2008: 412).

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artinya, partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota

partai. Pengertian ini, berarti juga partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha dalam rekrutmen politik dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk didik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama di masa mendatang (Supihatini, 2008: 19).

Pergantian pemimpin sangat diperlukan sebagai implementasi dari Negara demokrasi. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap kader-kader pemimpin politiknya yang kemudian memperjuangkan kader yang berkualitas dan memiliki kredibilitas pada jabatan-jabatan politik. Secara umum dapat dinyatakan, bahwa semakin lama suatu partai berkuasa semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menduduki jabatan pemerintah yang senior, dan harus pula menyiapkan diri untuk menemuh jalan hirarki kementerian. Betapapun juga jika suatu partai terlalu lama berada pada periode oposisi, kemudian mendapat kekuasaan untuk berkuasa, maka pengangkatan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sedemikian tadi untuk pos-pos senior (termasuk keanggotaan kabinet) adalah lebih besar kemungkinannya (Rush dan Althoff, 2000: 215).

Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan melalui media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Fungsi rekrutmen politik ini dapat juga disebut sebagai fungsi seleksi kepemimpinan (Sastroatmodjo, 1995: 122).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pada Bab XI Pasal 29 mengatur ketentuan lebih lanjut dari fungsi partai

politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut dalam ayat 1 sampai ayat 3 :

1. Ayat 1, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. Anggota partai politik
 - b. Bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.
 - c. Bakal calon Presiden dan wakil Presiden
 - d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Ayat 2, rekrutmen sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Ayat 3, penetapan atas rekrutmen sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai AD dan ART.

2.3.1 Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria .

Model rekrutmen politik dan seleksi politik juga di jelaskan oleh Philip Althop dan Michael Rush dalam (Rochmawaty: 2017), membaginya menjadi tujuh model yakni:

1. Seleksi melalui ujian dan pelatihan, model ini merupakan model yang umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan birokrasi dan

administrasi.

2. Seleksi melalui Pernyortiran (memilih yang terbaik), model ini dilakukan dengan melakukan pernyortiran atau penarikan undian. Model ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik.
3. Melalui perebutan kekuasaan. Model ini biasanya digunakan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan
4. Rotasi, memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa, maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik. Model ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.
5. Petronag, artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Model ini dilakukan dengan penyuapan dan korupsi. Model ini banyak digunakan oleh masyarakat Inggris.
6. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukkan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

Model ini dilakukan dengan cara dimana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan prekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu.
7. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Model ini merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional (Rahmadaniza, 2006: 10), dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu:

1. Semua warga Negara memiliki kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintahan.
2. Berdasarkan syarat-syarat objektif. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karna melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - 3) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keaglian dan keterampilan yang diperlukan.
 - 4) Berkelakuan baik
 - 5) Sehat jasmani dan rohani
 - 6) Tidak berdasarkan golongan, agama atau ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas (Rahmawaty:2017) berpendapat bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh semua warga Negara tanpa membedakan agama, golongan dan ras. Dan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

2.3.3. Sifat Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga Negara. Menurut Hariyanto (Rahmadaniza, 2006:11) sifat rekrutmen dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Rekrutmen Secara Terbuka.

Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan, apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Rekrutmen secara tertutup.

Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas (Rahmawaty:2017) berpendapat bahwa, rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses rekrutmen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses rekrutmen.

2.3.4 Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik. Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu :

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi – koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung menguntungkan partai politik.
3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok- kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota- anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorang yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu

memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan.

2.3.5 Faktor-Faktor Rekrutmen Politik

Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor-faktor dalam rekrutmen politik yaitu :

1. Faktor pendukung. Ada beberapa hal yang mendukung dalam proses rekrutmen politik, menurut Czudnowski dalam (Tricahyono, 2005) yaitu:

(1) *Social background*, faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan; (2) *Political socialization*, merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik; (3) *Initial political activity*, faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini; (4) *Apprenticeship*, faktor ini menunjuk kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain, yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit; (5) *Occupational variables*, calon elit dilihat pengalamannya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya dan (6) *Motivations*, orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karna dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

2. Faktor Penghambat. Ada beberapa hal yang menghambat dalam proses rekrutmen politik, menurut hasibuan dalam (selgaman, 1987) ada dua indikator yang mempengaruhi proses rekrutmen yaitu :

(1) Indikator “topeng” yaitu, (gelar akademik, jabatan publik, dan kekayaan atau *money politic*); dan (2) Indikator “kinerja” atau *trade recode*. Caranya dengan melihat kualitas manusia secara hakiki dan lebih substantif, seperti hasil karya, prestasi di masyarakat, sikap dan prilaku.

2.4 Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Kesejarahan Partai Nasdem Demokrat (Nasdem) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Partai ini berawal dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan.

Partai Nasdem memiliki visi mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Partai ini harus mampu memberi catatan baik dalam tiap perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Walau partai Nasdem tergolong baru akan tetapi partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Bapak Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkret (Restorasi Indonesia) yang merupakan perwujudan dari nasionalisme kebangsaan dan kedaulatan nasional yang berpijak pada masyarakat sejahtera.

Pada tanggal 7 Januari 2013, Nasdem memenuhi syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Tengah melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Jawa Tengah. Bahkan DPW Jateng juga telah berhasil membentuk kepengurusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah serta DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di seluruh kecamatan di Jawa Tengah.

Dalam pemilu 2014, Partai NasDem berhasil mendapat nomor urut 9 dalam perolehan suara nasional dengan jumlah suara 8.402.812 (6,72%). Hasil Pemilu tersebut berhasil mendudukkan kader partai Nasdem sebanyak 35 kursi DPR-RI periode 2014-2019. Adapun daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) berhasil mendudukkan 5 orang kader Partai Nasdem sebagai anggota DPR-RI.

Kelima caleg NasDem yang berhasil duduk di Senayan itu antara lain dari Dapil I (Kab.Kendal, Kab.Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga) diraih oleh Drs. Fadholi yang memperoleh 41.185 suara. Dapil II (Kab.Kudus, Jepara dan Demak) diraih oleh H.M Prasetyo yang memperoleh 51.999 suara. Dapil III (Grobogan, Blora, Rembang) dimenangkan Donny Imam Priambodo yang memperoleh 49.552 suara. Dapil VI (Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kab. Magelang dan Kota Magelang) dimenangkan Choirul Muna yang memperoleh 66.131 suara. Yang terakhir adalah Dapil VII (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) dimenangkan oleh Amalia Anggraini yang memperoleh 48.039 suara. Setelah beberapa lama menjabat, H.M Prasetyo kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung oleh presiden Joko Widodo, sehingga dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Ali Mahir sebagai anggota DPR-RI mewakili Dapil II Jateng.

Menjelang Pemilu dan Pilpres 2019 Partai Nasdem siap mengikuti untuk satu tekad dan tujuan yakni mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. Selain itu Partai Nasdem juga telah menentukan pilihan dan keputusan untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden RI di Pilpres 2019.

2.5 Hasil Penelitian Yang Terdahulu

1. Wakhidatul Afifa 2011

Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Kabupaten Semarang”**. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Wakhidatul Afifa 2011 perekrutan anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader PDI Perjuangan dan Rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Semarang dalam Pilkada 2010 dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan melalui tahap penjaringan, penyaringan tahap I (satu) dan II (dua).

Adapun faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah: 1) kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang berbasis nasionalis sesuai basis PDI Perjuangan, 2) pengorganisasian partai yang solid sampai Anak Ranting, 3) organisasi sayap PDI Perjuangan yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, 4) kemenangan PDI perjuangan dalam beberapa pemilu, 5) keaktifan

kader dan perilaku kader di masyarakat, dan 5) kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan Megawati. Dan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah: 1) dana, 2) SDM anggota partai, 3) anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, 4) citra PDI Perjuangan sebagai partai yang keras dan arogan, 5) terhentinya pelaksanaan kaderisasi dalam PDI Perjuangan, dan 6) program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.

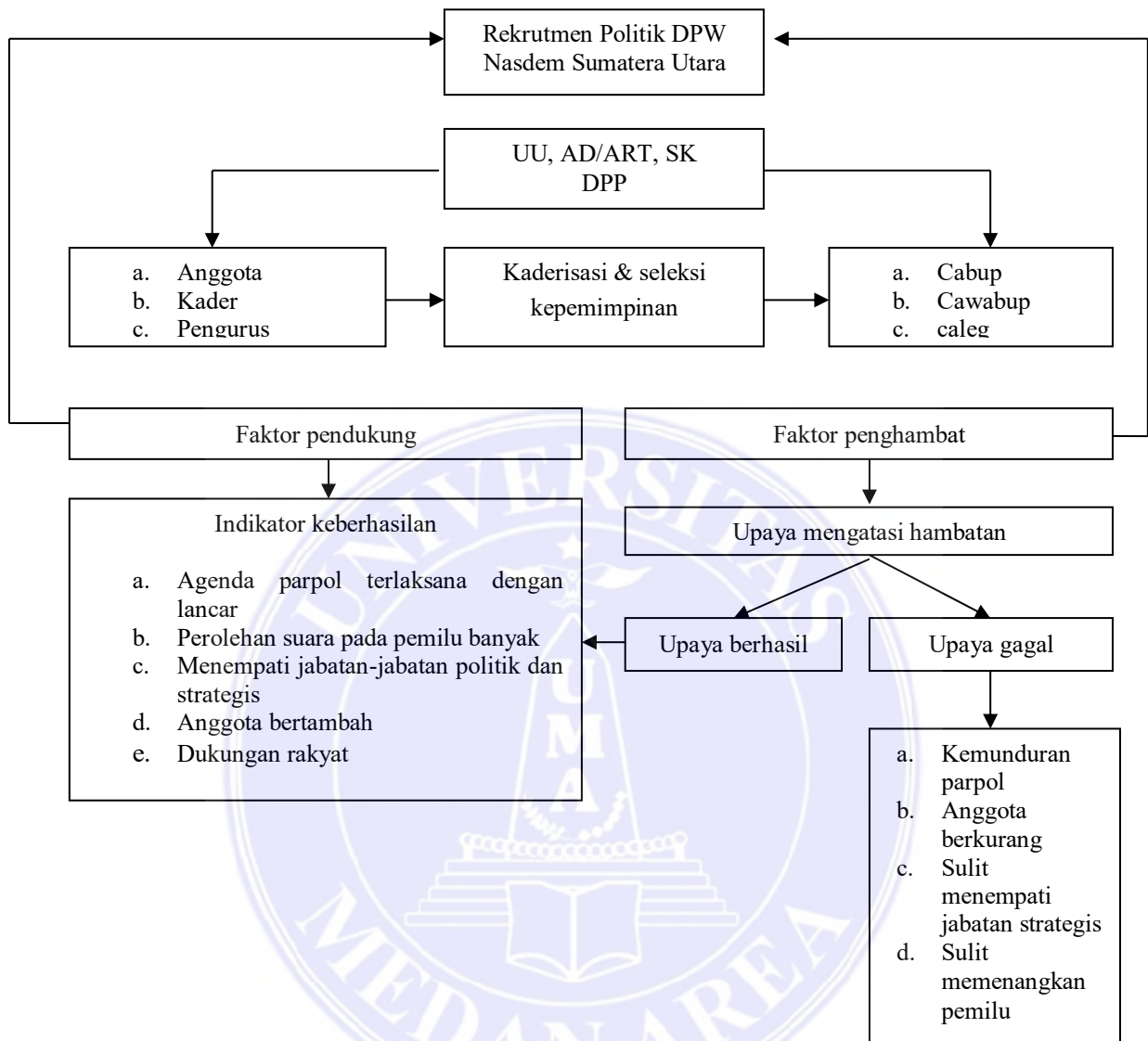
2. Siti Muslimah 2021

Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada partai golongan karya (golkar) kota Banjarmasin 2020”**. Adapun hasil penelitian Siti Muslimah 2021 Perengkrutan partai Golkar bertanggung jawab mengajukan kader yang terbaik untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Untuk memperlancar proses penentuan kader terbaik tersebut, maka pelaksanaan rekrutmen calon legislatif oleh Partai Golkar melalui tahap penjangkaran, penyaringan dan penetapan. Rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarmasin dalam Pilkada 2020 dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan melalui tahap-tahap seleksi pemilu PG kota Banjarmasin, melaksanakan kaderisasi untuk meningkatkan SDM partai, menyiapkan kader partai yang berkualitas yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin yang mana bentuk kegiatannya berupa sharing, Kursus Guru Kader , seminar, dan outbond, studi banding, pelatihan dan penyegaran. Adapun faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PG adalah: kondisi masyarakat kota Banjarmasin

yang berbasis nasionalis sesuai basis PG, pengorganisasian partai yang solid sampai pimpinan desa (PD), organisasi sayap PG yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, kemenangan PG dalam beberapa pemilu, keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, dan kekaguman masyarakat terhadap figur suharto dan suhardiman. Dan faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PG adalah: dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, citra PG yang banyak di isi oleh kaum pemodal tanpa kaderisasi, dan PG program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berpikir dalam penelitian implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada partai Nasdem di wilayah Sumatera Utara dapat digambarkan dengan alur di bawah ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian implementasi rekrutmen politik DPW Nasdem wilayah Sumatera Utara.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasdem berperan sebagai pelaksana rekrutmen politik di tingkat Sumatera Utara. Pelaksanaan rekrutmen politik didasarkan pada peraturan perundang-undangan, AD/ART partai, serta Surat Keputusan DPP Nasdem serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan rekrutmen politik. Nasdem merekrut anggota, kader dan pengurus partai untuk

kelestarian internal partai, untuk kemudian dilakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM partai yang nantinya akan dicalonkan dan diperjuangkan dalam pemilihan umum, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semakin banyak anggota partai yang dapat menduduki jabatan politik menjadi indikator implementasi rekrutmen politik oleh partai berhasil.

Pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat baik intern maupun ekstern partai. Partai politik perlu melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila upaya yang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik, maka partai akan mendapat dukungan dari rakyat untuk memperoleh suara dalam pemilu, kader partai dapat menduduki jabatan-jabatan politik, anggota partai akan bertambah, serta agenda partai dapat berjalan dengan lancar. Apabila upaya gagal dilakukan, maka partai akan mengalami kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anggota berkurang, dan sulit menempatkan kadernya dalam jabatan strategis dalam pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan menggunakan metodologi kualitatif pada penelitian ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Nasdem di wilayah Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan pengertian metodologi kualitatif menurut Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dipilih supaya penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Nasdem di wilayah Sumatera Utara dapat dideskripsikan secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari penelitiannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan HM Yamin, Medan provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa di tingkat Sumatera Utara partai Nasdem merupakan partai yang baru yang memperoleh 12 kursi pada pemilu 2019 dalam anggota DPRD Sumatera Utara.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wilayah Sumatera Utara dimulai sejak judul tugas akhir inidisetujui. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Ke -					
		Des 2023	Jan 2024	Feb 2023	Mar 2024	Mei 2024	Juni 2024
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Perbaikan Proposal						
4.	Pengumpulan Data Penelitian						
5.	Penyusunan Skripsi						
6.	Seminar Hasil						
7.	Perbaikan Skripsi						
8.	Sidang Meja Hijau						

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekrutmen politik pada Partai Nasdem Demokrat wilayah Sumatera Utara
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Partai Nasdem di wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik.

3.5 Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 129) yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2010:157). Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010:157). Untuk penelitian ini, sumber data yang dijadikan sebagai data primer adalah data berupa hasil wawancara yang didapat peneliti dari Informan.

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2010:132). Informan dalam

penelitian ini adalah ketua DPW, wakil ketua bidang (wakabid) internal yang bertugas menangani masalah internal partai dalam bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen DPW Nasdem Sumatera Utara, serta anggota / kader Nasdem Sumatera Utara yang dipilih secara acak oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Sumber data yang dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar yang terkait dengan materi partai politik, rekrutmen politik, Nasdem, AD/ART Nasdem, SK-SK Nasdem, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Moleong (2010: 9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186). Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010:190-191) metode wawancara memiliki bentuk, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan di dasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan aebitrer. wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaannya biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.

Melihat wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur yang dikemukakan di atas, pelaksanaan penelitian ini digunakan metode wawancara terstuktur, dimana peneliti sebagai pewawancara menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. pewawancara juga menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan pada terwawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan sebagai berikut.

- a. Wakabid Pemenangan Pemilu (DPW) Nasdem wilayah Sumatera Utara yaitu H. Salman Ginting, SH, M.AP
- b. Kepala sekretariat DPW Nasdem Sumatera Utara yaitu Hasan Simatupang S.kom
- c. Kaderi Partai (DPW) Nasdem wilayah Sumatera Utara yaitu Mas Khairunnisa S.S

Wawancara dengan beberapa informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen politik oleh Nasdem Sumatera Utara baik rekrutmen anggota, pengurus DPC, calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Nasdem Sumatera Utara dalam rekrutmen politik..

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa dokumen seperti data keanggotaan Nasdem Sumatera Utara, data nama-nama yang mendaftarkan diri untuk mengikuti penjurangan calon anggota legislatif, serta data nama-nama mendaftarkan diri untuk mengikuti penjurangan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2010:324).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam derajat kepercayaan perlu adanya teknik pemeriksaan, antar lain dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan (Moleong, 2010:327). Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin dalam Moleong (2010: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Menurut Patton dalam Moleong (2010: 331), teknik triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; dan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dari semua informan, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Dengan menggunakannya dua teknik triangulasi ini, maka diperoleh hasil penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Nasdem Sumatera Utara, serta memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rekrutmen politik Nasdem Sumatera Utara.

3.8 Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dilakukan suatu analisis data dengan maksud untuk mengolah data yang ada. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2010:280).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu (Moleong, 2010:247).

3.9 Prosedur Penelitian

Melalui prosedur ini penelitian diharapkan menjadi lebih terstruktur dan terkonsep, sehingga ini akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sampai pada pengambilan kesimpulan. Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini ada lima tahap, yaitu sebagai berikut.

a. Tahap pembuatan rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan yang akan digunakan dalam penelitian di lapangan. Rancangan penelitian dalam hal ini dibuat dalam bentuk proposal penelitian yang memuat latar belakang penelitian, landasan teori, dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Tahap persiapan penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan yang berkaitan dengan penelitiannya. Peneliti mengajukan proposal yang telah dibuat, mengurus perizinan tempat penelitian dan mengajukan instrumen penelitian.

c. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari responden, informan, dan dokumen. Data-data yang diperoleh tersebut nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang akurat dan jelas terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.

d. Mengolah data penelitian

Pada tahap ini, seluruh hasil pelaksanaan penelitian yaitu yang berupa data-data diolah dengan analisis data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sebelum melakukan penyimpulan, data perlu dievaluasi sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan penelitian ini dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan dapat segera melengkapinya.

e. Tahap penyusunan laporan

Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya disusun, ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang lain, serta prosedurnya

pun diketahui orang lain pula sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan penelitian tersebut (Arikunto,2006:27).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader Partai Nasdem dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader Partai Nasdem.
2. - Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik Partai Nasdem adalah:
 - a. kondisi masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berbasis nasionalis sesuai basis Partai Nasdem, b) pengorganisasian partai yang solid sampai Anak Ranting, c) organisasi sayap Partai Nasdem yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, d) kemenangan Partai Nasdem dalam beberapa pemilu, e) keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, dan f) kekaguman masyarakat terhadap figur Suria Paloh.- Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik Partai Nasdem adalah:
 - a) dana, b) SDM anggota partai, c) anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, d) citra Partai Nasdem sebagai partai yang keras dan arogan, e) terhentinya pelaksanaan kaderisasi dalam Partai Nasdem, dan f) program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil yang bermanfaat untuk masyarakat agar usaha untuk mengajak masyarakat bergabung dengan partai berhasil dengan lebih baik.
2. Mengingat pentingnya kaderisasi, maka Partai Nasdem perlu mengoptimalkan kembali kaderisasi. Kaderisasi hendaknya dilakukan secara terus menerus dan mencakup seluruh anggota partai agar partai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) partaiselenggara memudahkan partai untuk keperluan reorganisasi pengurus partai dan penjangkaran calon legislatif dan calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem Tahun 2021-2024.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah Ph. D. 2007. *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 2008. *Mengelola Partai Politik - Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan keenam.
- Hamid, Ahmad. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemirtaan.
- Hikam, Muhammad AS dkk. 1999. *Mbak Mega Saya Ikut Sampeyan*. Jakarta: Lingkaran Jurnalistik.
- <https://nasdem.id>
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan kesembilan.
- Kusriyanto, Bambang. *Peran Parpol Dalam Membangun Kehidupan Demokrasi*, majalah Interupsi, edisi 98 / Th. VIII / Nopember 2010.
- Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.
- Maran, Rafael. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology* oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh

Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.

Suprihatini, Amin. 2008. Partai Politik di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih.

Umar, Husein. 2005. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Edisi Revisi dan Perluasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.



LAMPIRAN I

DATA INFORMAN

Informan Kunci

1. Nama : H. Salman Ginting, SH, M.AP
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Wakabid Pemenangan Pemilu (DPW) Nasdem wilayah Sumatera Utara
Instansi : Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara

Informan Utama

1. Nama : Hasan Simatupang S.kom
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala sekretariat DPW Nasdem Sumatera Utara
Instansi : Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara

Informan Tambahan

1. Nama : Mas Khairunnisa S.S
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kaderi Partai (DPW) Nasdem Sumut
Instansi : Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara

LAMPIRAN II

WAWANCARA

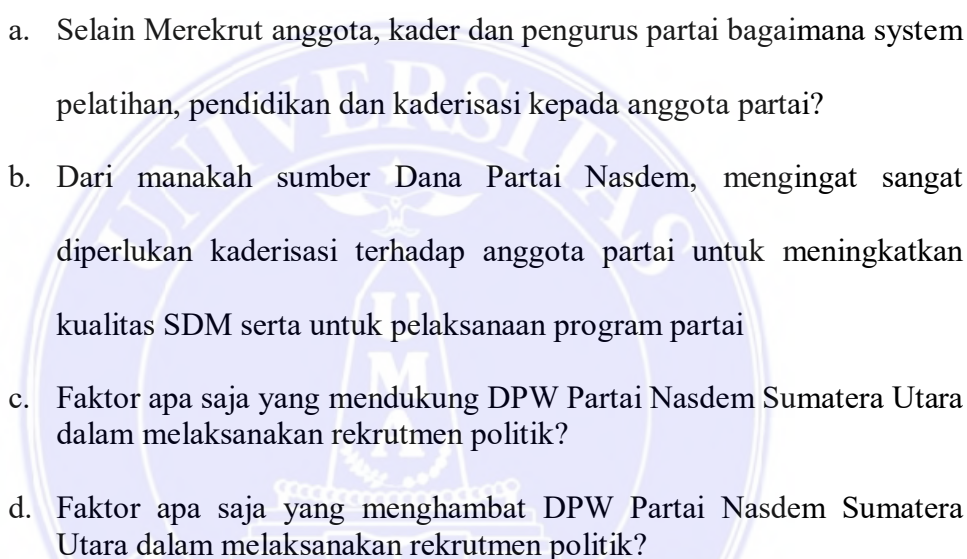
Nama Informan : H. Salman Ginting, SH, MAP
Jabatan : Wakabid Pemenangan Pemilu DPW Nasdem Sumatera Utara
Ditujukan Untuk : Informan Kunci
Tempat : Kantor DPW Nasdem Sumatera Utara

- a. Peraturan-peraturan apa saja yang menjadi landasan DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi rekrutmen politik?
- b. Siapa saja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan rekrutmen politik DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana cara yang dilakukan oleh DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara dalam merekrut anggota baru?
- d. Bagaimana Pelaksanaan Perekrutan anggota baru yang dilakukan oleh DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara
- e. Bentuk Sosialisasi Seperti apakah yang dilakukan oleh DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara dalam mendapat perhatian dari masyarakat
- f. Salah satu syarat menjadi anggota adalah melalui masa pembinaan, apa maksudnya?
- g. Bagaimana Ketentuan dan Syarat bagi anggota baru untuk menjadi kader partai DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara
- h. Bagaimana implementasi rekrutmen pengurus DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara

LAMPIRAN III

WAWANCARA

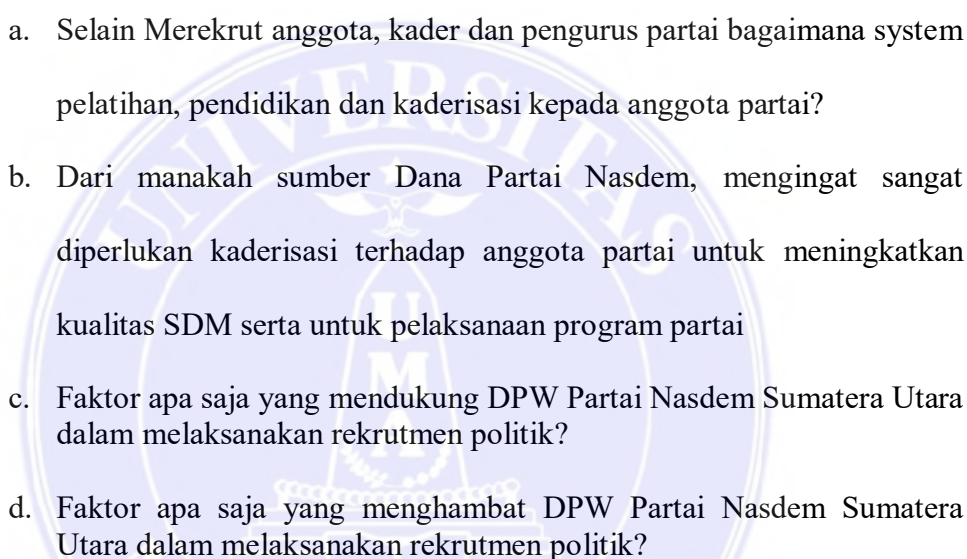
Nama Informan	: Hasan Simatupang, S.Kom
Jabatan	: Kepala Sekretariat DPW Nasdem Sumatera Utara
Ditujukan Untuk	: Informan Utama
Tempat	: Kantor DPW Nasdem Sumatera Utara

- 
- Selain Merekrut anggota, kader dan pengurus partai bagaimana system pelatihan, pendidikan dan kaderisasi kepada anggota partai?
 - Dari manakah sumber Dana Partai Nasdem, mengingat sangat diperlukan kaderisasi terhadap anggota partai untuk meningkatkan kualitas SDM serta untuk pelaksanaan program partai
 - Faktor apa saja yang mendukung DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik?
 - Faktor apa saja yang menghambat DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik?

LAMPIRAN IV

WAWANCARA

Nama Informan	: Mas Khairunnisa, S.S
Jabatan	: Kader Partai Nasdem Sumatera Utara
Ditujukan Untuk	: Informan Tambahan
Tempat	: Kantor DPW Nasdem Sumatera Utara

- 
- Selain Merekrut anggota, kader dan pengurus partai bagaimana system pelatihan, pendidikan dan kaderisasi kepada anggota partai?
 - Dari manakah sumber Dana Partai Nasdem, mengingat sangat diperlukan kaderisasi terhadap anggota partai untuk meningkatkan kualitas SDM serta untuk pelaksanaan program partai
 - Faktor apa saja yang mendukung DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik?
 - Faktor apa saja yang menghambat DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik?

LAMPIRAN V



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak H. Salman Ginting, SH, M.AP
Selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai Nasdem Provinsi
Sumatera Utara Pada Tanggal 20-02-2024, Pukul 13.07 WIB (Sumber :
Dokumentasi Penulis 2024)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hasan Simatupang S.kom
Selaku Kepala sekretariat DPW Nasdem Sumatera Utara, Pada Tanggal 20-02-
2024, Pukul 13.25 WIB (Sumber : Dokumentasi Penulis 2024)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Mas Khairunnisa S.S
Selaku Kader Partai DPW Nasdem Sumatera Utara, Pada Tanggal 20-02-2024,
Pukul 13.35 WIB (Sumber : Dokumentasi Penulis 2024)



Gambar 4. Gedung DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024)

LAMPIRAN VI



Dewan Pimpinan Wilayah
Partai NasDem
Provinsi Sumatera Utara

Medan, 28 Maret 2024

Nomor : 0974/SE.I/DPW-NasDem/SU/III/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyelesaian Riset

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Nomor : 265/FIS.2/01.7/1/2024 Tanggal 30 Januari 2024 Perihal Pengambilan Data/Riset :

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD PADRIS FATAHIYA
NIM : 178520073
Program Studi : Administrasi Publik

Telah menyelesaikan Pengambilan Data/Risetnya dengan baik di Kantor DPW
Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**An. DPW Partai NasDem
Provinsi Sumatera Utara**


Hasan Simatupang, S.Kom
Kepala Sekretariat

Sekretariat : Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.41 Medan - Sumatera Utara
Telp. 061-42001717 | Email: dpwnasdemsumut1@gmail.com | www.pdnasdemsumut1.com

 Dipindai dengan CamScanner

